

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terkait pemaknaan jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia terhadap identitas dan pengalaman kerjanya, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan. Dengan mengkaji dan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, peneliti dapat menemukan celah penelitian untuk diisi dan dilengkapi oleh penelitian ini.

Pada subbab ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu terkait posisi dan pengalaman jurnalis perempuan dalam ranah jurnalisme yang kerap dianggap maskulin. Selain itu, ada pula penelitian-penelitian terdahulu terkait pengalaman kerja jurnalis yang memiliki identitas marginal ganda, terutama secara gender dan etnis.

2.1.1 Menjadi Perempuan di Dalam Jurnalisme yang Maskulin

Masyarakat patriarkis, melalui stigma dan stereotipnya, berusaha mengatur perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari cara bersikap, cara berpakaian, hingga pekerjaan apa yang pantas mereka kerjakan. Ada profesi feminim yang dinilai cocok dikerjakan oleh perempuan, seperti perawat, asisten, dan guru, serta profesi maskulin yang dianggap tak cocok bagi perempuan, seperti arsitek, pemrogram komputer, dan jurnalis.

Salah satu hal yang membuat jurnalisme kerap dianggap sebagai bidang yang tak cocok bagi perempuan adalah pola kerjanya yang menuntut jurnalis untuk turun ke lapangan, tangguh secara fisik dan mental saat menghadapi tekanan berbagai pihak, dan berkejaran dengan waktu (Ainah & Yanuar, 2017; Amelia, 2014; Silitonga, 2019). Hal ini tidak cocok dengan stereotipe yang menempel pada perempuan dalam budaya patriarkis: lemah, emosional, tidak tahan derita, serta pengurus

ranah domestik (Amelia, 2014; Herawati, 2016; Remotivi, 2021; Silaban & Septiana, 2021; Silitonga, 2019; Stellarosa & Silaban, 2019).

Akibat stigma dan stereotipe tersebut, jurnalisme hingga saat ini masih menjadi industri yang didominasi oleh laki-laki. Survei AJI pada 2012 menunjukkan bahwa perbandingan jurnalis laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 10:3. Pada tahun yang sama, AJI mencatat jumlah total anggota sebanyak 1.521 orang. Dari 1.521 anggota tersebut, hanya terdapat 347 orang jurnalis perempuan, kurang dari 20%. Survei yang sama juga menemukan bahwa jurnalis perempuan yang berhasil menempati posisi strategis dan struktural di redaksi hanya berjumlah enam persen dari keseluruhan jurnalis perempuan (Luviana, 2012). Tak heran jika pada akhirnya pola kerja, kebijakan redaksi, dan sudut pandang media kurang ramah terhadap perempuan (Amelia, 2014; Herawati, 2016; Silaban & Septiana, 2021; Silitonga, 2019; Stellarosa & Silaban, 2019). Alhasil, kerap kali jurnalis perempuan perlu merepresi sifat-sifat feminim yang ia miliki dan ‘menjadi maskulin’ saat bekerja.

Di dalam redaksi dan kegiatan jurnalistiknya, jurnalis perempuan pun tak luput dari diskriminasi. Meski hasil riset Haris et al. (2019) pada jurnalis perempuan di *Riau Televisi* tidak menemukan adanya ketidakadilan gender dalam proses promosi jabatan di *Riau Televisi*, hasil riset Stellarosa & Silaban (2019) menunjukkan bahwa masih sedikit jurnalis perempuan yang berhasil berada di posisi puncak struktur redaksi karena tempat kerjanya belum ramah perempuan. Ramah perempuan yang dimaksud di sini adalah ketersediaan fasilitas, fleksibilitas kerja, dan hal-hal lain yang mendukung perempuan untuk terus berperforma baik dalam pekerjaannya meski ia menjalankan peran ganda (istri, ibu, pekerja), seperti cuti haid, ruang menyusui, mobil antar-jemput di malam hari, serta fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Hal ini didukung dengan temuan Silitonga (2019) bahwa dari lima redaksi tempat para informannya bekerja, tak ada yang menyediakan ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

Diskriminasi ini tak hanya terjadi terhadap jurnalis perempuan di Indonesia. Di redaksi sebuah stasiun televisi publik Polandia, misalnya, diskriminasi dan objektifikasi terhadap jurnalis perempuan bahkan sudah membudaya dan dilanggengkan oleh para anggota redaksi, baik laki-laki maupun perempuan (Gober, 2020). Jurnalis-jurnalis perempuan yang dianggap tua dan tak lagi memenuhi “standar kecantikan televisi”, akan dipindahkan atau mengundurkan diri dari kegiatan yang mengharuskannya tampil di depan layar, terlepas dari kompetensinya. Sementara itu, jurnalis-jurnalis perempuan muda kerap ditugaskan untuk meliput di gedung parlemen karena anggota parlemen—yang kebanyakan merupakan laki-laki—lebih tertarik untuk berbicara dengan jurnalis perempuan muda.

Berkaitan dengan hal tersebut, jurnalis perempuan juga rentan dan sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual saat bekerja, baik oleh rekan kerja, narasumber, maupun orang asing (Kristanti, 2019; Luviana, 2012; Silitonga, 2019). Dampaknya tak main-main. Dalam penelitian Kristanti (2019) mengenai dampak perundungan dan pelecehan seksual daring terhadap jurnalis perempuan, dua dari tiga informan bercerita bahwa mereka merasa tertekan dan tidak nyaman saat bekerja karena pelecehan seksual yang dialaminya. Salah satunya bahkan pernah menangis karena membaca komentar berisi pelecehan seksual yang ditujukan kepadanya. Pekerjaan mereka pun terganggu karena mereka merasa tidak nyaman saat berada di luar rumah, selalu waspada, dan dihantui ketakutan bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang pernah melecehkannya.

Amelia (2014) mengatakan bahwa hal-hal yang telah disebutkan di atas merupakan bukti nyata adanya segregasi horizontal dan vertikal berbasis gender dalam industri media. Menjadi perempuan memang sulit, tetapi lebih sulit lagi menjadi perempuan yang bekerja dalam industri maskulin seperti jurnalisme.

2.1.2 Marginalitas Ganda di Ruang Redaksi: Gender dan Etnis

Meski menjadi perempuan di ranah profesi maskulin seperti jurnalisme adalah pekerjaan yang berat, sesungguhnya ada lagi yang lebih berat: menjadi perempuan dari etnis marginal di ruang redaksi. Tak hanya menanggung stigma, stereotipe, dan diskriminasi terhadap perempuan saja, jurnalis-jurnalis perempuan yang berasal dari etnis marginal juga harus menanggung stigma, stereotipe, dan diskriminasi berbasis etnisitas, baik di dalam ruang redaksi maupun dalam masyarakat (Duke, 2009; Meyers & Gayle, 2015). Sebagai penyandang status marginalitas ganda, mereka adalah kelompok paling rentan di ruang redaksi. Pengalaman dan sudut pandang mereka pun berbeda dari pengalaman dan sudut pandang laki-laki yang berasal dari etnis marginal yang sama (Meyers & Gayle, 2015).

Hasil penelitian Duke (2009) mengenai rasisme, seksisme, dan diskriminasi kelas sosial yang dialami jurnalis perempuan kulit hitam di Amerika menunjukkan bahwa opresi yang dirasakan oleh jurnalis perempuan kulit hitam pada tiga level berbeda: personal, komunitas, dan institusi. Pengalaman sebagai kelompok marginal ganda-lah yang umumnya mendorong mereka untuk berkarier di media. Mereka ingin mengubah sistem, membuat pemberitaan menjadi lebih ramah terhadap komunitas mereka. Pada kenyataannya, selama bekerja, jurnalis perempuan kulit hitam menghadapi diskriminasi berlapis dan mengambil peran tambahan sebagai edukator redaksi mengenai isu-isu komunitas mereka. Meski begitu, Meyers & Gayle (2015) menemukan bahwa jurnalis perempuan kulit hitam selalu berupaya melawan diskriminasi, stereotipe, dan memperkaya perspektif redaksi dengan menampilkan orang keturunan Afrika-Amerika sebagai narasumber ahli dan panutan, tidak memilih orang Afrika-Amerika yang terlihat stereotipikal sebagai narasumber, serta mengedukasi rekan kerja dan manajemen media mengenai isu rasial.

Douglas (2021) memakai istilah ‘paradoks keberagaman dan inklusi’ (*‘diversity and inclusion paradox’*) untuk menggambarkan bagaimana jurnalis kulit berwarna yang bekerja di media arus utama di Inggris masih mengalami diskriminasi di dalam dan di luar redaksi, meski kerap dijadikan token keberagaman oleh institusi untuk menjaga citranya. Mereka ada, tetapi tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan redaksi. Bahkan, terkadang, mereka dijadikan ‘tumbal’ untuk melakukan liputan-liputan terkait isu kulit berwarna karena para jurnalis kulit putih merasa kikuk atau tak paham isu. Praktik ini akhirnya melepaskan jurnalis kelompok dominan (kulit putih) dari kewajiban untuk benar-benar menjadi inklusif (Robinson & Culver, 2016).

Di Indonesia, diskursus mengenai etnis dan ras memang jauh lebih kompleks dibandingkan diskursus etnis dan ras di negara-negara Barat, misalnya Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ia berlapis dan berkelindan dengan aspek agama, geografis, kesukuan, sejarah keluarga, dan gender. Dalam bukunya yang berjudul *On Not Speaking Chinese*, Ien Ang (2021), akademisi perempuan Tionghoa-Indonesia yang lahir di Surabaya dan besar di Belanda bercerita mengenai kompleksitas identitasnya. Ang, yang tidak bisa berbahasa Mandarin karena lahir di Surabaya (di mana akulturasi budaya menyebabkan kelompok Tionghoa-Indonesia di sana kebanyakan berbahasa Jawa) dan besar di Belanda mengalami krisis identitas saat diekspektasikan untuk bisa berbahasa Mandarin oleh ‘dunia Barat’ hanya karena ia terlihat Tionghoa.

Meski begitu, diskriminasi terhadap jurnalis dari etnis marginal pun terjadi di Indonesia. Dalam masyarakat, etnis Tionghoa-Indonesia kerap mendapat stereotipe sebagai etnis yang oportunis, eksklusif, dan kaya raya (Chong, 2014). Oleh sebab itu, jurnalis Tionghoa-Indonesia sering diragukan status jurnalisnya saat meliput di lapangan. Seorang informan dalam penelitian Yordania (2020) yang merupakan satu-satunya jurnalis Tionghoa-Indonesia di redaksinya mengatakan bahwa berita yang dibuatnya kerap kali tidak dinaikkan, terutama jika

berhubungan dengan etnis Tionghoa-Indonesia. Informan tersebut menduga bahwa redaktur di tempat kerjanya memiliki sentimen terhadap etnis Tionghoa-Indonesia.

Sayangnya, masih sedikit riset yang berfokus pada pengalaman jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia. Meski di dalam penelitian Yordania (2020) terdapat informan jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia, penelitian tersebut tidak spesifik menggali pengaruh identitas dan trauma kolektif yang jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia tersebut alami terhadap caranya bekerja. Penelitian Meyers & Gayle (2015) dan Duke (2009), meski memiliki topik yang cukup serupa dengan riset ini, berfokus pada pengalaman jurnalis perempuan Afrika-Amerika dan jurnalis perempuan kulit hitam. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tentang keberagaman dan interseksionalitas dalam redaksi dengan menyorot pengalaman jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia.

2.2 Teori dan Konsep

Di samping penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sejumlah teori dan konsep yang relevan. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti memang disarankan untuk mengesampingkan segala pengetahuan dan asumsi awalnya mengenai topik dan subjek penelitian untuk menghindari bias, salah satunya adalah dengan menghindari penggunaan teori dan konsep sebagai pisau analisis. Namun, menurut Larsen & Adu (2021), teori dan konsep tetap dapat digunakan dalam penelitian fenomenologi untuk menjelaskan penelitian, merepresentasikan tema dan ide yang relevan dengan penelitian, menjustifikasi penelitian, membantu peneliti dalam menentukan arah dan model penelitian, serta menginformasikan pembaca mengenai sudut pandang yang dipakai dalam penelitian.

2.2.1 Standpoint Theory

Standpoint theory pertama kali dicetuskan oleh filsuf feminis Sandra Harding (1986) dalam bukunya, *The Science of Question in Feminism*.

Teori ini merupakan teori feminis dan oleh sebab itu sering pula disebut sebagai *feminist standpoint theory*. Namun, ia berakar dari pemikiran Hegel mengenai dialektika tuan/hamba (*master/slave dialectic*), pemikiran Marx mengenai kelas sosial (*social class*), dan pemikiran Lukács mengenai kesadaran kelas (*class consciousness*) (Bowell, n.d).

Para filsuf yang mencetuskan dan mengembangkan *standpoint theory* berargumen bahwa pengetahuan, pada dasarnya, selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Dalam masyarakat yang terstratifikasi berdasarkan gender, ras, kelas ekonomi, dan kelas-kelas sosial lainnya, posisi sosial seseorang membentuk dan mempengaruhi apa yang ia ketahui dan caranya memandang dunia, sebagaimana dicontohkan oleh Terri Elliot (1994) dalam esainya, “*Making Strange What had Appeared Familiar*” (p. 426):

“Person A approaches a building and enters it unproblematically. As she approaches she sees something perfectly familiar which, if asked, she might call ‘The Entrance’. Person X approaches the same building and sees a great stack of stairs and the glaring lack of a ramp for her wheelchair.”

“Orang A mendekati sebuah gedung dan memasukinya tanpa masalah. Saat mendekati gedung, ia melihat sesuatu yang sangat familiar. Jika ditanya, ia akan menyebutnya sebagai “Pintu Masuk”. Orang X mendekati gedung yang sama. Ia melihat tangga yang menjulang dan ketiadaan rampa untuk kursi rodanya.”

Pada contoh di atas, ‘orang A’ adalah orang tanpa disabilitas fisik dan ‘orang X’ adalah orang dengan disabilitas fisik pengguna kursi roda. Namun, argumen ini dapat diterapkan pada semua kelompok marginal. Hasil riset Robinson & Culver (2016) misalnya, menunjukkan bahwa reporter kulit putih tidak menyadari bagaimana reportase mereka—yang menggunakan sudut pandang kulit putih—memperkuat ketidakpercayaan masyarakat kulit hitam terhadap mereka.

Esensinya, posisi sosial kelompok marginal memungkinkan anggota kelompok marginal untuk lebih menyadari hal-hal di sekeliling

mereka dan mempertanyakan hal tersebut dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok dominan. Oleh sebab itu, *standpoint theory* juga berargumen bahwa riset, terutama yang berfokus pada relasi kuasa, perlu dimulai dari sudut pandang orang-orang yang termarginalisasi (Borland, 2020).

Harding (1993) dalam “*Rethinking Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity’*” mengatakan bahwa *standpoint theory* melihat posisi sosial dan historis seseorang sebagai kontribusi yang mungkin berharga bagi perkembangan pengetahuan. Sebab, di dunia yang tidak setara, orang-orang yang berada pada posisi teratas hierarki sosial mudah kehilangan kepekaan terhadap relasi antarmanusia dan realitas sosial yang sebenar-benarnya. Ia mengatakan bahwa para ilmuwan seringkali mengabaikan fakta bahwa meskipun metode dan hasil riset mereka diklaim objektif, ia tak benar-benar ‘objektif’ karena ekosistem riset pada dasarnya masih androsentris dan seksis. Oleh sebab itu, *standpoint theory* berupaya untuk tetap menghargai objektivitas, sembari mengakomodasi, menganalisis, dan mengerti efek posisi sosial terhadap agen-agen yang terlibat dalam riset dan pengetahuan yang mereka miliki dengan tidak memandang efek relasi kuasa terhadap agen-agen riset sebagai subjektivitas, melainkan bagian dari objektivitas yang sebenar-benarnya. Lagipula, realitas itu kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dalam perkembangannya, *standpoint theory* banyak mendapatkan kritik, salah satunya mengenai bagaimana teori ini membangun narasi universalisme palsu, seolah semua anggota suatu kelompok marginal memiliki sudut pandang yang sama (Borland, 2020). Padahal, identitas seseorang tidaklah pernah tunggal. Misalnya, seorang perempuan kulit hitam pasti memiliki sudut pandang yang berbeda dengan perempuan kulit putih meskipun mereka sama-sama perempuan. Sebab, dalam struktur sosial, perempuan kulit hitam memiliki beban marginalitas ganda, secara gender dan secara ras. Di sisi lain, perempuan

kulit putih hanya marginal pada satu aspek, yaitu gender karena memiliki privilese kulit putih (*white privilege*).

Oleh sebab itu, Collins (1990) mencetuskan *black feminist standpoint theory* atau yang kerap disebut dengan *black feminist thought* dalam bukunya, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Ia berargumen bahwa opresi berlapis dan berkelindan yang dialami perempuan Afrika–Amerika—secara ras, gender, kelas ekonomi, dan kultural—memberikan mereka sudut pandang tersendiri. Untuk memahami pengalaman perempuan kulit hitam pun, dibutuhkan sudut pandang khusus.

Persoalan serupa dibahas oleh Ien Ang (2001) dalam bukunya, *On Not Speaking Chinese: Living between Asia and the West*. Sebagai perempuan Tionghoa-Indonesia yang bermigrasi ke Australia, Ang mengalami marginalitas berlapis: secara gender, etnis, dan nasionalitas. Ia melihat bahwa nilai-nilai kebudayaan dan feminisme lokal yang dipegang perempuan Asia seringkali bertabrakan dengan nilai feminisme yang dicanangkan perempuan kulit putih. Perempuan Asia memaknai dan menghidupi feminisme dengan cara mereka sendiri, sesuai dengan konteks lokalitas dan nilai kebudayaan mereka yang berbeda dari nilai kebudayaan Eropa/Amerika. Hal ini tidak membuat mereka menjadi ‘kurang feminis’ atau ‘bukan feminis’.

Dengan segala pengembangan pada *standpoint theory*, pada akhirnya, *standpoint theory* tetap berupaya untuk menggabungkan penghormatan epistemik terhadap dunia dan penerimaan bahwa pengalaman dan cara pandang seseorang dengan dan terhadap dunia dipengaruhi oleh keadaan sosialnya masing-masing. Teori ini pada hakikatnya adalah sebuah kritik terhadap pandangan epistemik konvensional yang mengatakan bahwa pengetahuan hanya bisa dicapai dengan mengadopsi sudut pandang ‘netral’ karena sesungguhnya, tak ada yang sudut pandang yang benar-benar netral di dunia ini (Harding, 2004).

Standpoint theory kerap digunakan dalam penelitian-penelitian terkait pengalaman kelompok marginal, seperti penelitian Duke (2009) dan Meyers & Gayle (2015). Dalam penelitian ini, *standpoint theory* berfungsi sebagai acuan sudut pandang penelitian. Karena penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia—yang menyanggah identitas marginal gender dan etnis di masyarakat—memaknai identitas dan pengalaman kerjanya, sudah seharusnya penelitian ini mengadopsi sudut pandang kelompok marginal.

2.2.2 Social Identity Theory

Social identity theory pertama kali dikembangkan oleh Henri Tajfel, seorang psikolog sosial asal Polandia, pada awal dekade 1970-an. Tajfel dan rekan-rekannya menemukan bahwa mengelompokkan sekelompok individu yang berbeda-beda ke dalam sebuah grup dapat membuat individu-individu tersebut berpikir sebagai anggota grup, alih-alih sebagai individu (Ellemers, 2020). Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana identitas seseorang sebagai anggota kelompok tertentu mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka, baik terhadap diri sendiri, kelompok sendiri (*in-group*), maupun kelompok lain (*out-group*) (Bicchieri et al., 2018; Ellemers, 2020; Harwood, 2020).

Menurut *social identity theory*, terdapat tiga proses psikologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang membentuk dan memaknai posisinya di dalam masyarakat, yaitu pengelompokan sosial, komparasi sosial, dan identifikasi sosial. Pengelompokan sosial adalah kecenderungan orang-orang untuk mempersepsikan diri mereka dan orang lain sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu, alih-alih sebagai individu yang unik (Bicchieri et al., 2018; Ellemers, 2020). Proses kognitif inilah yang melahirkan stereotipe dan konformitas sosial, seperti yang dielaborasi oleh Turner, murid Tajfel yang kemudian turut

mengembangkan *social identity theory* (Bicchieri et al., 2018; Ellemers, 2020; Harwood, 2020).

Selain pengelompokan sosial, ada pula komparasi sosial, yaitu sebuah proses saat orang-orang menentukan nilai relatif atau posisi sosial sebuah kelompok tertentu, termasuk posisi sosial orang-orang di dalam kelompok tersebut (Ellemers, 2020). Dari segi gender, misalnya, perempuan dianggap memiliki posisi sosial yang lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam konteks Tionghoa-Indonesia sendiri, sebagai minoritas, warga Tionghoa-Indonesia kerap kali dianggap dan diperlakukan sebagai ‘yang liyan’ oleh masyarakat Indonesia non-Tionghoa. Meski demikian, *social identity theory* berargumen bahwa pada dasarnya, semua kelompok ingin dilihat secara positif oleh kelompok lain (Bicchieri et al., 2018; Ellemers, 2020; Harwood, 2020)

Terakhir, identifikasi sosial. Melalui konsep identifikasi sosial, *social identity theory* berargumen bahwa pada umumnya, seseorang tidak bisa mempersepsikan situasi sosial sekadar sebagai pengamat yang terlepas dari situasi sosial itu sendiri. Serupa dengan *standpoint theory*, *social identity theory* pun menganggap bahwa bagaimana seseorang memandang dirinya dan keterkaitan mereka dengan orang lain dalam situasi sosial mempengaruhi cara mereka memandang orang lain dan dunia (Ellemers, 2020; Harwood, 2020).

Lalu, bagaimana kelompok marginal, seperti kelompok marginal gender dan etnis, merespons marginalisasi yang mereka alami? *Social identity theory* menawarkan tiga strategi untuk memperbaiki status sosial seseorang atau suatu kelompok, yaitu mobilitas individu, kompetisi sosial, dan kreativitas sosial (Ellemers, 2020; Harwood, 2020). Jika seseorang memilih untuk melakukan mobilitas individu dalam rangka memperbaiki status sosialnya, ia akan ‘meninggalkan’ suatu kelompok sosial untuk kelompok sosial lain yang lebih dihargai oleh masyarakat (Harwood, 2020). Misalnya, saat seorang perempuan yang bekerja di lingkungan maskulin bertindak seperti laki-laki di tempat kerja,

mengadopsi karakteristik maskulin, dan ‘meninggalkan’ karakteristik yang dianggapnya feminim, atau saat seorang Tionghoa-Indonesia meninggalkan atribut budaya ketionghoaan (nama, agama, bahasa) untuk mempermudah asimilasi sosial dan menghindari diskriminasi.

Jika suatu kelompok memutuskan untuk melakukan kompetisi sosial, mereka akan bergerak secara kolektif untuk menentang *status quo* dan berupaya menaikkan posisi sosial kelompok mereka dalam hierarki sosial (Harwood, 2020) dengan membuat perubahan sosial. Contohnya dapat kita lihat pada gerakan kesetaraan gender atau pada gerakan Black Lives Matter pada skala global.

Terakhir, untuk merespons marginalisasi, sebuah kelompok atau individu dapat mengubah persepsi orang terhadap diri atau kelompok mereka dengan cara menekankan dan menunjukkan nilai-nilai positif yang dimiliki kelompok tersebut, atau mencari kelompok pembanding lain yang lebih rendah (Ellemers, 2020; Harwood, 2020). Contohnya, saat seseorang dari kelompok marginal berupaya menjadi *model minority*.

Seseorang umumnya memiliki identitas sosial yang beragam karena mereka tergabung dalam berbagai kelompok sosial, mulai dari kelompok keagamaan, kelompok gender, kelompok etnis, kelompok tempat tinggal, hingga kelompok profesi seperti dokter atau jurnalis. Sherwood & O'Donnell (2016) misalnya, menemukan bahwa identitas sosial seorang jurnalis sangat terkait dengan jenis pekerjaan dan tempat kerja jurnalis tersebut.

Social identity theory umumnya dipakai dalam penelitian yang berhubungan dengan relasi antarkelompok, terutama terkait dengan kelompok etnis, ras, dan agama (Ellemers, 2020). Misalnya, dalam penelitian Yordania (2020) tentang pemaknaan wartawan Tionghoa terhadap identitas etnis dan diskriminasi yang dialaminya dalam pekerjaan, juga dalam riset Meyers & Gayle (2015) mengenai bagaimana jurnalis perempuan Afrika-Amerika menavigasi posisinya di dalam

redaksi sebagai kelompok marginal ganda. Dalam penelitian ini, *social identity theory* digunakan untuk merepresentasikan tema dan ide yang relevan dengan penelitian, yaitu terkait posisi sosial jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia.

2.2.3 Marginalitas Ganda

Marginalitas ganda adalah kondisi saat seseorang atau suatu kelompok mengalami opresi berlapis yang saling berkelindan satu sama lain, dalam satu aspek kehidupannya atau lebih. Hal ini dicontohkan dengan baik oleh Collins (1990) dalam bukunya, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Collins berargumen bahwa perempuan kulit hitam adalah kelompok marginal ganda karena selain didiskriminasi karena gendernya, perempuan kulit hitam juga didiskriminasi karena warna kulit dan rasnya. Diskriminasi berlapis yang mereka alami membuat perempuan kulit hitam berada pada posisi sosial yang lebih rendah dari perempuan kulit putih karena perempuan kulit putih memiliki privilese dan tidak mengalami diskriminasi struktural yang disebabkan oleh warna kulit mereka.

Meyers & Gayle (2015) dalam riset mereka mengenai jurnalis perempuan Afrika-Amerika di AS menyatakan bahwa pengalaman perempuan Afrika-Amerika dalam menghadapi rasisme tidak bisa disamakan dengan pengalaman laki-laki Afrika-Amerika dalam menghadapi rasisme. Sebab, meski berasal dari kelompok etnisitas yang sama, laki-laki kulit hitam, secara struktural, memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibanding perempuan kulit hitam karena dalam masyarakat, laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan.

Hal tersebut jugalah yang ingin ditekankan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, jurnalis perempuan Tionghoa-Indonesia diidentifikasi sebagai kelompok marginal ganda karena identitas gender dan etnisitas mereka. Identitas gender dan etnisitas mereka yang saling terkait satu sama lain membuat mereka lebih rentan menjadi korban

diskriminasi. Hal ini juga membuat pengalaman mereka unik dan berbeda dari jurnalis laki-laki Tionghoa-Indonesia karena dalam budaya Tionghoa, ajaran Konfusius yang mengamini sistem patriarkal masih mengakar kuat (Lim, 2009). Perempuan Tionghoa-Indonesia akhirnya memiliki identitas dan pengalaman yang khusus, yang berbeda dari perempuan yang berasal dari kelompok dominan di Indonesia (non-Tionghoa) dan berbeda pula dari laki-laki Tionghoa-Indonesia.

2.2.4 Identitas Tionghoa-Indonesia

Mendefinisikan identitas Tionghoa-Indonesia tidaklah mudah. Sebab, meski memiliki sejarah kolektif, kebudayaan dan pengalaman setiap orang Tionghoa-Indonesia dapat berbeda satu sama lain. Perbedaan budaya dan pengalaman ini dipengaruhi berbagai faktor, antara lain oleh sub-etnis, gender, lokasi geografis, agama, dan kelas ekonomi orang Tionghoa-Indonesia tersebut (Davis, 2010; Lim, 2009). Contohnya, orang Tionghoa-Indonesia yang tinggal di Sumatra kemungkinan besar memiliki kebudayaan dan pengalaman yang berbeda dari orang Tionghoa-Indonesia yang tinggal di Jawa. Keberagaman pengalaman dan budaya tersebut juga dibentuk dan dipengaruhi oleh keadaan sosial, politik, dan sejarah rumit yang melingkupi hidup komunitas Tionghoa-Indonesia sejak zaman penjajahan hingga saat ini (Davis, 2010).

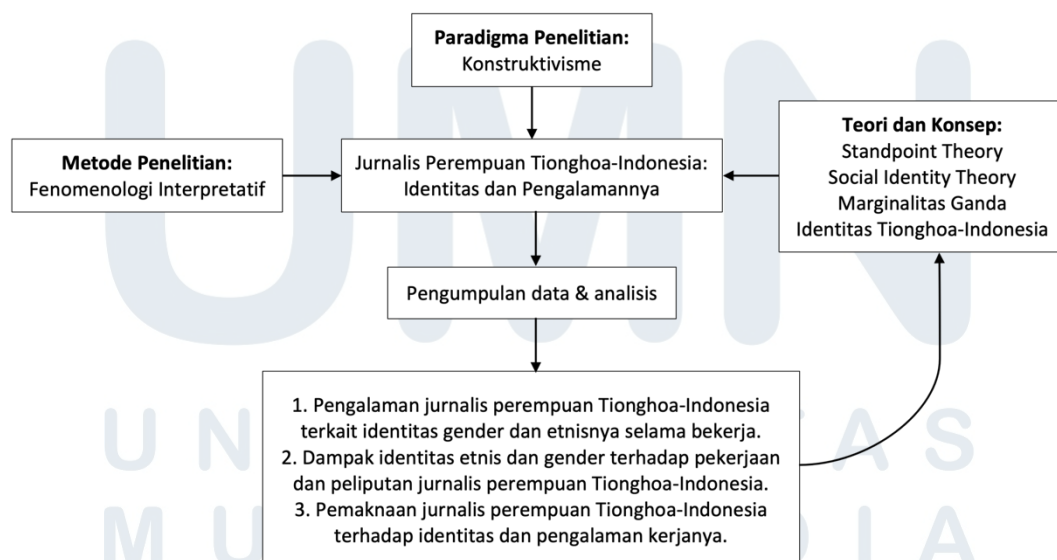
Davis (2010) dalam *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Jati Diri* menjabarkan bagaimana identitas Tionghoa-Indonesia dibentuk dan kemudian direpresi oleh pemerintahan Orde Baru dengan peraturan pergantian nama, pelarangan kebudayaan Tionghoa di ruang publik, hingga pelarangan obat-obatan dan media populer yang berasal dari negara Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Penghapusan identitas ini akhirnya menambah kompleksitas dan memperumit identitas masyarakat Tionghoa-Indonesia. Sebagian masyarakat Tionghoa-Indonesia bahkan menginternalisasi represi tersebut dan menyangkal identitas Tionghoa-Indonesia-nya (Lim, 2009).

Secara khusus, identitas perempuan Tionghoa-Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran Konfusianisme yang mengakar dalam budaya dan keluarga Tionghoa (Davis, 2010; Lim, 2009). Dalam Konfusianisme, perempuan memang dinomorduakan, sehingga secara inheren, budaya Tionghoa-Indonesia adalah budaya yang patriarkis. Lim (2009) menjabarkan beragam ekspektasi yang ditempatkan pada perempuan Tionghoa-Indonesia oleh keluarga, seperti keharusan untuk menikah serta kewajiban untuk meneruskan dan menjaga ‘tradisi keluarga’.

Meski penelitian Lim (2009) dan Davis (2010) sama-sama menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai dan pengalaman kolektif yang membentuk identitas Tionghoa-Indonesia, keduanya juga mendapatkan konklusi bahwa orang-orang Tionghoa-Indonesia selalu berupaya merekonstruksi dan mendefinisikan ulang identitasnya. Identitas Tionghoa-Indonesia tak pernah statis. Ia senantiasa mengalami perubahan.

2.3 Alur Penelitian

Bagan 2.1 Alur Penelitian



Sumber: olahan peneliti